



Fakultas
Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta



INOVASI

Dalam Semangat

KEINDONESIAAN

Editor : Pandhu Yuanjaya | Danu Eko Agustinova



PERAN PEREMPUAN INDONESIA DENGAN SEMANGAT KEINDONESIAAN

Hastuti

Laki-laki dan perempuan adalah bagai seekor burung dengan dua sayapnya. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai yang setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali (Soekarno).

Ungkapan Soekarno dalam karyanya *Sarinah* menunjukkan bahwa laki-laki perempuan bukan sebagai dikotomi yang harus dipertentangkan. Perempuan dan laki-laki adalah sebagai satu kekuatan utuh yang secara bersama harus seiring sejalan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Perempuan Indonesia saat ini dapat menikmati hasil perjuangan menuju kesetaraan dari kultur patriarki telah mendominasi kehidupan perempuan di Indonesia. Istilah “Perempuan” dan “Wanita” memiliki konteks berbeda dalam paradigma kesetaraan. Perempuan memiliki konteks bebas stereotipe apabila menggunakan istilah per “empu” an untuk sosok kaum Hawa. Perempuan terkait dengan istilah empu adalah sosok yang ahli (KBBI Online). Istilah untuk kaum Hawa wanita memiliki konteks “*wani ditoto*” meskipun ada yang memaknai sebagai “*wani mranoto*”. Wanita memiliki konteks pasif pada istilah *ditoto* yakni perempuan seharusnya wanita bersedia diatur dalam gerak langkahnya, sedangkan konotasi kemandirian dan dominan pada istilah *mranoto*, bahwasannya perempuan seharusnya menempatkan posisi mengatur. Istilah wanita jarang digunakan untuk membahas tentang kaum Hawa terkait dengan kesetaraan gender.

Perempuan di Indonesia sebenarnya sejak lama memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pahlawan wanita sudah dikenal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada Cut Nyak

Dien, Laksamana Malahayati, Dewi Sartika, Kartini, Martina Christina Tiahahu yang memiliki peran dalam perjuangan bangsa guna mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari belenggu penjajahan. Perjuangan perempuan yang disimbulkan dengan perjuangan Kartini dalam meraih kesetaraan menjadi amunisi bagi perempuan di Indonesia untuk terbebas dari belenggu patriarki, kultur yang menempatkan perempuan sebagai stereotipe. Sejak perjuangan pembebasan perempuan dari belenggu kultur patriarki dicanangkan, maka perempuan mulai melebarkan kiprah mereka di sektor publik seperti bidang ekonomi, sosial, kultural baik tingkat lokal, regional, dan nasional. Perempuan Indonesia meskipun telah masuk pada ruang publik, namun ruang domestik masih tetap menjadi tanggung jawab utama perempuan.

Wanita Indonesia telah aktif sejak lama, bahkan ketika tahun 1928 sudah dimulai dengan Konggres Perempuan pertama, kala itu tonggak peran perempuan pada sektor publik di Indonesia mulai diperjuangkan secara terus menerus. Wanita dengan kemampuan inovasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan suatu negara (Kompas, 2018). Secara eksplisit peran perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia mendapat perhatian luas dengan terbukanya kesempatan bagi perempuan masuk ke segala lini sektor publik. Meningkatkan kemampuan perempuan agar memiliki kualitas memadai sehingga mampu berkompetisi secara transparan dalam kehidupan ini, sebagai keniscayaan yang harus terus diperjuangkan. Perempuan merupakan sosok penting dalam pembangunan bangsa sampai saat ini representasi perempuan terus dilakukan termasuk keterwakilan perempuan di parlemen dan peran perempuan pada lembaga pemerintah dan lembaga lain. Satu sisi upaya memperhatikan potensi

perempuan untuk mencapai kesetaraan masih terus dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat mendorong perempuan terjun ke sektor publik. Beratnya beban yang harus dipikul perempuan mengharuskan perempuan dapat bertindak bijaksana untuk meraih kesempatan dapat berperan optimal dalam publik tanpa mengabaikan tugas domestik.

Kewajiban domestik dan publik seharusnya menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan sehingga perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkiprah meningkatkan kualitas dirinya. Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia untuk menempatkan perempuan pada kedudukan setara dengan lawan jenisnya tetap memperhatikan etika ketimuran. Etika dengan semangat keindonesiaan yang memperhatikan kodrat perempuan mengatur rumah tangga, mengasuh anak, dan melaksanakan kewajiban sosial kemasyarakatan. Kondisi itu menempatkan perjuangan kesetaraan perempuan berbeda dengan negara barat. Kebebasan perempuan di sektor publik masih terikat pada tugas utama perempuan pada tugas domestiknya.

Kondisi Wanita Indonesia

Perempuan sebagai sumberdaya manusia merupakan potensi yang harus dimanfaatkan dalam peningkatan kemajuan bangsa mengingat kuantitas penduduk perempuan di Indonesia seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Upaya perbaikan kehidupan perempuan terus dilakukan melalui antara lain peningkatan pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja, perbaikan kesehatan. Jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 126,8 juta jiwa dan jumlah penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa dengan ratio 101,2 (BPS, 2016). Kualitas perempuan dilihat dari angka melek huruf perempuan berumur

15 tahun ke atas sebesar 90,64 persen. Angka melek huruf tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka melek huruf kelompok penduduk laki-laki yaitu 95,87 persen pada kelompok umur yang sama (BPS, 2016). Kualitas perempuan terus ditingkatkan mengingat potensi perempuan sebagai sumberdaya diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam kehidupan berbangsa. Kualitas perempuan ditingkatkan melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan memadai, jaminan kesehatan, serta perluasan kesempatan berusaha yang terbuka dan berkeadilan. Terkait kondisi kualitas perempuan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel. 1. Kondisi Kualitas Perempuan

No	Indikator	Tahun 2015
1.	Angka Harapan Hidup	72,78
2.	IPM	66,98
3.	Harapan Lama Sekolah	12,68
4.	Rata-rata lama sekolah	7,35
5.	Pengeluaran per Kapita	8.464

Sumber: BPS, 2015

Menurut laporan Biro Pusat Statistik persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 36,97 persen, dilihat menurut daerah tempat tinggal persentase perempuan yang mengurus rumah tangga di perkotaan sebesar 38,52 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 35,41 persen. Selanjutnya bila dilihat perbandingan kegiatan selama seminggu yang lalu antara perempuan dan laki-laki, persentase tertinggi baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah pada kelompok yang bekerja. Hal yang menarik adalah pada perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 47,91 persen sedangkan laki-laki sebesar 79,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding

yang melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga yaitu hanya sebesar 1,63 persen, sedangkan perempuan yang bekerja tidak terlalu dominan karena persentase perempuan yang mengurus rumah tangga juga cukup tinggi yaitu sebesar 36,97 persen (BPS, 2016). Tugas rumah tangga tentu saja menyita banyak waktu dan tenaga perempuan sehingga diperlukan pembagian kerja secara berkeadilan pada tugas rumah tangga yang dapat dipertukarkan secara kultural.

Kultur di Indonesia bahwa laki-laki seharusnya menjadi pencari nafkah utama sehingga laki-laki yang diprioritaskan harus bekerja guna memperoleh pendapatan, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan. Pembagian kerja demikian mendorong laki-laki hanya memilih pekerjaan yang menjanjikan pendapatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja dengan usia 15 tahun keatas (usia produktif) di perkotaan 48,67 persen di perdesaan mencapai 54,13 persen. Perbandingan TPAK laki-laki 84,42 persen dan perempuan hanya 51,39 persen (BPS, 2016). Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan, dan tingkat partisipasi laki-laki jauh diatas perempuan. Sesuai dengan kultur di Indonesia yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama bahwa laki-laki memiliki tingkat partisipasi angkata kerja lebih tinggi. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi perempuan untuk bekerja karena meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan perluasan perempuan di sektor publik. Perluasan peran perempuan di sektor publik berarti memberi kesempatan perempuan untuk ikut berkiprah pada berbagai kegiatan yang memiliki sumbangan pada kemajuan negara mengingat jumlah penduduk perempuan hampir separuh penduduk laki-laki.

Peran serta perempuan Indonesia harus terus ditingkatkan agar Indonesia tidak tertinggal pada percaturan regional dan global. Nilai Indeks Pengarusutamaan Gender Indonesia bahkan masih di bawah nilai rata-rata global yang sebesar 93,8 (BPS, 2016). Indeks pengarusutamaan gender sebagai indikator kesetaraan gender yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dari berbagai sektor. Berawal dari titik ini upaya untuk meningkatkan peran perempuan terus perbaiki agar perempuan sebagai sumberdaya memiliki kesempatan yang luas untuk berkecimpung dan berkompetisi secara berkeadilan.

Perempuan terus didorong untuk dilibatkan pada peran publik yakni pada legislatif agar perempuan dapat secara aktif berperan dalam setiap kebijakan terkait peningkatan kualitas manusia. Hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki diatur negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ditegaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984.

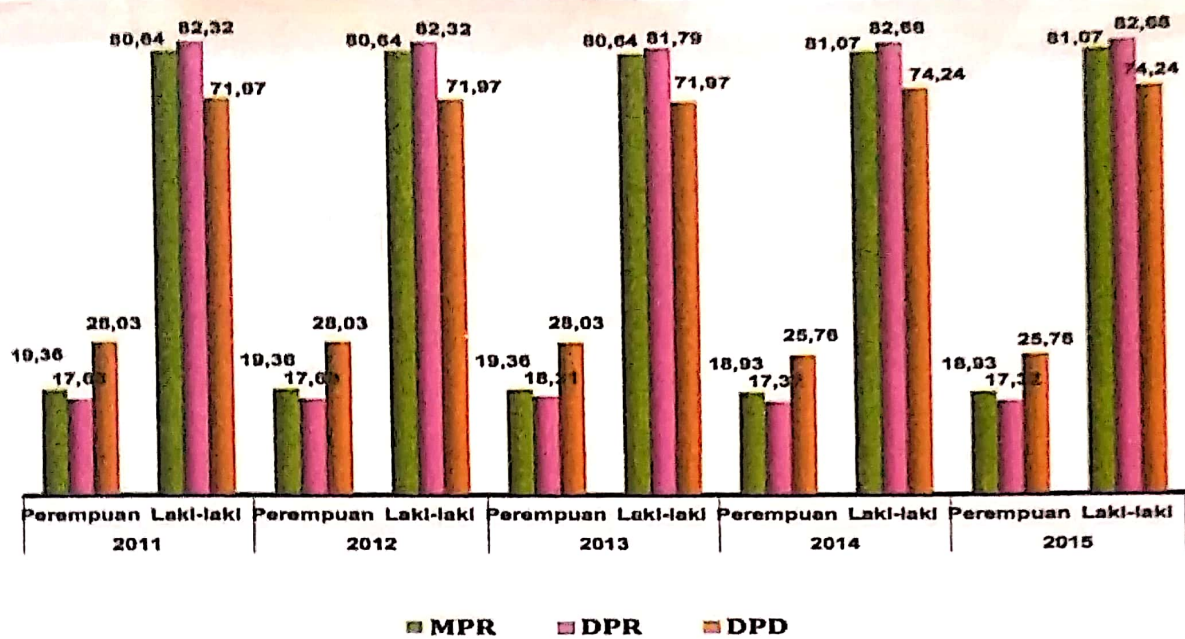
Struktur sosial patriaki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki dan beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki, perempuan pantas melakukan pekerjaan rumah tangga (Siti Nimrah dan Sakaria, 2015). Perempuan dengan beban ganda (domestik publik), dan masih rendahnya kualitas perempuan menjadi kendala bagi perempuan melakukan kegiatan pada ranah formal. Ranah tersebut misalnya pada kontestasi legislatif yang

belum dapat dimanfaatkan oleh perempuan dengan optimal meskipun regulasi sudah dibuka lebar. Perempuan yang terlibat secara aktif dalam bidang tersebut belum memenuhi harapan. Peluang sudah dibuka, regulasi sudah disiapkan namun perempuan belum dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik karena perempuan belum sepenuhnya siap untuk masuk ke ranah tersebut. Rendahnya kualitas perempuan serta kegamangan perempuan sendiri untuk masuk ke ranah tersebut menjadi kendala yang masih membelenggu perempuan di Indonesia pada umumnya.

Peningkatan peran serta perempuan terus dilakukan dengan keperpihakan melalui regulasi yang disediakan, namun demikian struktur sosial patriarki masih lekat dengan kehidupan perempuan sampai saat ini sehingga regulasi yang tersedia belum dapat secara optimal mendobrak patriarki. Perempuan untuk mencapai kesetaraan 30 persen peran dalam pemerintahan sangat susah. Di legislatif saja saat ini baru 17 persen, belum sampai ke atas. Lalu kabinet menteri yang baru saat ini masih 23 persen. Kemudian perempuan yang menjadi kepala daerah saat ini baru 86 orang dari 516 kabupaten/kota di Indonesia (Yohana, 2018). Bukti ini sebagai penjelasan betapa kesetaraan gender masih harus terus diperjuangkan untuk mendorong perempuan dapat berperan secara optimal di sektor publik.

Kultur patriarki yang mewarnai kehidupan perempuan Indonesia sejak lama turut menyumbang kegamangan perempuan masuk pada ranah publik yang memerlukan keseriusan dan totalitas perempuan. Perempuan Indonesia masih tetap memikirkan tugas domestiknya yang bersifat kultural meskipun perempuan sadar tugas tersebut dapat diselesaikan bersama dengan lawan jenisnya. Distribusi laki-laki dan perempuan pada legislatif dapat dilihat di tabel berikut;

**Grafik.1. Distribusi Perempuan dan Laki-laki Pada Legislatif
Tahun 2011-2015**



Sumber : BPS, 2016

Perempuan dilihat dari grafik mengenai keterlibatan perempuan pada ruang legislatif dalam lima tahun jauh persentasenya dengan persentase kurang dari 30 persen. Rendahnya partisipasi perempuan pada ruang legislatif karena kegamangan perempuan untuk masuk kedalam ruang tersebut. Kerasnya kompetisi tanpa kecukupan modal yang dimiliki perempuan menjadi kendala utama.

Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam UUD No 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan indikator peningkatan kualitas perempuan yang strategis, dengan pendidikan yang baik maka perempuan akan memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan publik yang berkualitas. Perempuan dengan pendidikan yang lebih baik memungkinkan perempuan menjadi pengasuh yang baik bagi generasi masa depan. Mengenai distribusi pendidikan laki-laki dan perempuan pada wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel.2. Distribusi Pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	PT
1	2	3	4	5	6
Perkotaan	Perempuan	107,99	93,78	87,57	31,47
	Laki-laki	108,63	92,59	83,46	27,28
Perdesaan	Perempuan	112,06	90,68	71,32	11,84
	Laki-laki	112,97	88,04	69,26	9,52
K+D	Perempuan	110,09	92,15	79,77	22,63
	Laki-laki	110,88	90,22	76,40	19,20

Sumber : BPS RI, Susenas 2015

Perempuan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi semakin kecil persentasenya, perempuan pada daerah perdesaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih parah dengan persentase pendidikan rendah lebih dominan dibandingkan daerah perkotaan. Perluasan kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan berusaha terus dilakukan agar perempuan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik, tentu saja penting bagi perempuan mengingat peran perempuan yang meliputi separuh penduduk dan perempuan merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Perempuan dengan tugas publik yang mulai terbuka luas disatu kaki, maka satu kaki yang

lain tugas perempuan adalah menyiapkan generasi masa depan sesuai dengan tugas domestik yang harus diemban.

Tugas domestik alami yang tidak dapat dipertukarkan secara gender yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tugas domestik konstruksi social dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi perempuan masuk ke ruang publik, apalagi dengan dalih membantu kepala rumah tangga mencari nafkah tentu saja memerlukan upaya penyadaran laki-laki. Penyadaran kesetaraan gender bahwa tugas domestik hasil konstruksi sosial dapat dipertukarkan sehingga beban domestik tersebut secara bersama dipikul laki-laki dan perempuan. Penyadaran kesetaraan gender perlu terus disosialisasikan ke masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang setara pada ruang publik dan ruang domestik hasil konstruksi sosial

Dinamika Peran Wanita Indonesia Dalam Konteks Keindonesiaan

Era global didominasi dinamika perubahan ditandai cepatnya penyebaran informasi, pendeknya waktu tempuh ke berbagai belahan bumi, tentu saja berpengaruh terhadap dinamika perempuan di Indonesia. Perempuan dalam mengakses informasi melalui internet pada seluruh kelompok umur ternyata persentase perempuan lebih kecil dibanding laki-laki (BPS, 2016). Ketatnya persaingan dan beban hidup yang semakin berat dihadapkan tata nilai yang semakin longgar seiring pesatnya kemajuan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia memberi dampak pada perubahan gaya hidup. Perempuan memperoleh kesempatan lebih sedikit dalam menikmati hasil kemajuan teknologi sehingga tantangan yang harus dihadapi perempuan sebagai ibu, sosok yang harus bertanggung jawab pada generasi anak bangsa di masa depan menjadi lebih berat. Bagi perempuan sendiri era tersebut juga

memerlukan kepiawaian dalam mensiasati, betapa perempuan yang sudah mulai menapakkan di sektor publik tanpa dapat melepaskan tugas domestik sesuai etika ketimuran yang dianut di Indonesia. Kompetisi yang semakin ketat untuk membangun kekuatan dan menguasai dunia dari sisi ekonomi, politik, teknologi, ilmu pengetahuan bahkan ideologi sehingga pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan sengaja dibangun sulit menghindar dari pengaruh global.

Peran perempuan semakin menarik dikaji ditandai dengan banyaknya tulisan dengan topik perempuan, beralih untuk mengangkat perempuan agar mampu berperan dalam proyek peningkatan kesejahteraan umat manusia. Namun demikian kontroversi terpinggirkannya perempuan sebagai dampak pembangunan terus mengedepan meskipun gagasan untuk mendudukan perempuan secara proporsional telah dicanangkan. Gagasan pengintegrasian perempuan dalam pembangunan dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam pendekatan pembangunan sampai saat ini dianggap belum sepenuhnya mampu membawa perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki secara proporsional. Pasca MDGs 2015 kemudian dilakukan kesepakatan melalui SDGs, perempuan masih menjadi perhatian pembangunan dengan menempatkan tujuan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender. Selama ini ada anggapan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sehingga perempuan terperangkap dalam ketidakberdayaan karena kultur patriarki yang menempatkan perempuan sebagai stereotype.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen yang telah diratifikasi banyak negara di dunia termasuk Indonesia untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Satu terobosan yang dilakukan dalam SDGs adalah menempatkan penduduk sebagai

pelaku aktif dan tujuan akhir pembangunan. Prinsip yang diusung SDGs yakni, *No One Should Left Behind*, telah menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok yang mendapat perhatian penuh (BPS, 2016). Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui industri rumahan dan wirausaha perempuan untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan kekerasan, dan peningkatan indeks ketahanan rumah tangga (Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Selama ini perempuan lebih dilihat sebagai objek pembangunan sehingga perempuan kurang dilibatkan secara aktif dalam program pembangunan untuk perempuan. Perempuan dalam program pembangunan seharusnya ditempatkan sebagai subjek pembangunan, dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sebagai subjek tentu akan berdampak luas pada percepatan peningkatan peran perempuan. Kesetaraan gender merupakan pintu untuk memasuki gerbang kesejahteraan dengan menghapuskan kemiskinan. Kunci untuk menghapuskan kemiskinan adalah membuka kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk dapat akses pada pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan. Badan sehat dan pendidikan baik dengan pemenuhan gizi pada perempuan dan laki-laki yang memadai memungkinkan mereka terbebas dari belenggu kemiskinan. Pilihan yang dapat dilakukan menjadi lebih luas ketika kualitas perempuan baik. Perempuan dengan kualitas yang lebih baik memungkinkan perempuan dapat berperan lebih luas untuk membangun semangat keindonesia. Kiprah perempuan dalam konteks keindonesiaan dapat dilakukan pada ruang domestik dan ruang publik. Memahami cita-cita pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka peran perempuan dalam pembangunan

berkelanjutan sesuai dengan yang dicanangkan dalam SDGs dan Nawacita sebagai program pembangunan pemerintah saat ini. Penulis menerjemahkan peran perempuan dalam konteks keindonesiaan dapat dilakukan dalam berbagai peluang baik pada ruang domestik dan ruang publik.

Peran perempuan dalam konteks keindonesiaan dapat dilakukan dalam berbagai peluang baik pada ruang domestik dan ruang publik. Perempuan pada ruang domestik meliputi antara lain tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat memaksa perempuan dapat memperoleh pendapatan guna membantu menopang pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tugas rumah tangga yang dapat dipertukarkan seharusnya dibagikan dengan lawan jenisnya agar perempuan tidak harus menanggung beban yang lebih berat ketika perempuan masuk ke ruang publik. Perjuangan untuk pembagian kerja secara berkeadilan ini terus diperjuangkan dalam kesetaraan gender agar perempuan memperoleh keadilan pada sektor domestik dan publik. Ketika perempuan masuk ke sektor publik diharapkan beban domestiknya dapat dilakukan bersama dengan lawan jenisnya.

Peran perempuan dalam bidang pendidikan melalui peningkatan pendidikan yang berujung pada perluasan kesempatan kerja bagi perempuan yang makin luas. Perempuan dengan modal pendidikan yang memadai, maka perempuan akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam mengakses kesempatan kerja yang menjanjikan pendapatan lebih memadai. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan sudah terbuka lebar sehingga perempuan dapat memperoleh pendidikan ke segala jenjang pendidikan tanpa pengecualian. Kultur patriarki pada awalnya membelenggu perempuan

untuk menikmati pendidikan karena peluang pendidikan lebih diprioritaskan untuk laki-laki terutama ketika satu rumah tangga mengalami tekanan ekonomi, maka kesempatan memperoleh pendidikan akan diprioritaskan untuk laki-laki. Peran perempuan dalam ekonomi akan mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan kebutuhan hidup yang lebih berkualitas. Pendapatan yang memadai memungkinkan pemenuhan kebutuhan yang lebih bervariasi. Secara sinergi dengan pendidikan yang baik, maka kesempatan memperoleh pendapatan memadai lebih terbuka. Pendapatan yang memadai tentu akan berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, hal demikian tentu akan berdampak pada peningkatan pergerakan sektor industri.

Penutup

Saat ini kondisi perempuan Indonesia telah memperoleh kesempatan untuk peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan kesetaraan gender yang lebih baik. Peran perempuan Indonesia pada ruang publik tentu saja tetap harus berpegang pada semangat keindonesiaan yang memegang etika ketimuran. Perempuan terjun ke ruang publik dengan tetap memperhatikan tugas utama perempuan pada ruang domestik. Tuntutan yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah pengertian dari laki-laki, bahwa tugas domestik yang dapat dipertukarkan seharusnya dapat dilakukan secara berkeadilan antara laki-laki dan perempuan.

Referensi

- Alami, Atiqah Nur. 2016. *Perempuan dan Globalisasi Studi Kasus Trafficking di Kabupaten Kerawang*. Mahara Publishing. Banten.
- Biro Pusat Statistik. 2016. *Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*. Lintas Khatulistiwa. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia On Line.
- Kompas. 2018. Indonesia Bisa Maju Dengan Inovasi Kreativitas Generasi Muda Dan Wanita. *Kompas Online* 27 April 2018.
- Soekarno. 1947. *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Siti Nimrah dan Sakaria. 2015. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1 No. 2, July 2015 | P-ISSN: 2407-9138*.
- Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Kajian Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumah Tangga*. BISA. Jakarta.
- Yohana. 2018. Perempuan Indonesia Banyak Tidak Tertarik Dengan Politik. *Merdeka.com* 10 Juli 2018.